BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan dan perkembangan sektor industri memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian di Indonesia. Industrialisasi sebagai proses dan pembangunan industri yang berada dalam satu jalur kegiatan, sehingga pada hakikatnya untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat (Muldiana, 2018, p. 2). Industrialisasi telah membawa dampak positif, seperti peningkatan lapangan kerja dan pendapatan masyarakat. Akan tetapi, dapat membawa dampak negatif khususnya pada lingkungan hidup, yang terwujud dalam bentuk pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat aktivitas industri.

Pada dasarnya industrialisasi melibatkan upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta pemanfaatan sumber daya alam. Oleh karena itu, permasalahan lingkungan akan menjadi perhatian lebih lanjut jika semakin berkembangnya industri di berbagai daerah. Permasalahan lingkungan akan terus menjadi masalah serius selama manusia tidak sadar untuk mempertimbangkan dan berupaya untuk menjaga keselamatan dan keseimbangan alam. (Muldiana, 2018, p. 2)

Jika menelusuri penyebab dari permasalahan dan kerusakan lingkungan, maka akan menemukan berbagai faktor penyebab, akan tetapi yang menjadi salah satu penyebabnya adalah maraknya pencemaran dan perusakan lingkungan yang disebabkan oleh perusahaan dalam kegiatan industrinya, terlebih perusahaan

tersebut bersinggungan dengan alam sebagai bahan bakunya yang menyebabkan degradasi lingkungan.

Sehingga, pemerintah mengakulasikan bahwa dampak negatif terhadap lingkungan merupakan suatu beban yang harus dibayar, dibalik kerusakan lingkungan masyarakat segelintir perusahaan menikmati keuntungan dari *tragedy of the common*, maka dari itu perusahaan yang mencemari lingkungan harus membayar beban atau kompensasi atas dampak pencemaran yang dilakukan (Pangkep, 2015). Disamping hal tersebut, perusahaan sebagai salah satu aktor ekonomi dalam suatu wilayah, baik desa, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi dan negara. Hal tersebut membuat banyaknya perusahaan yang melakukan kegiatan *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) atau tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh perusahaan agar terciptanya masyarakat yang sejahtera dan mengurangi risiko akibat dari lingkungan yang terdampak.

Bertolak dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berisi tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perusahaan untuk berperan dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Kemudian, diperkuat kembali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, dimana dalam peraturan ini memastikan bahwa perusahaan dalam beroperasi tidak hanya fokus terhadap keuntungan semata, akan tetapi memberikan perhatian yang serius terhadap dampak sosial dan lingkungan dalam aktivitas perusahaan. Peraturan

tersebut menjadikan CSR sebuah keharusan bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang yang berkaitan dengan sumber daya alam. Adanya landasan-landasan hukum yang dicantumkan dapat menjadikan perusahaan dan pemangku kepentingan menerapkan kebijakan ini sebaik-baiknya.

Oleh sebab itu, *Corporate Sosial Responsibility* yang selanjutnya akan ditulis oleh penulis sebagai CSR dapat dijadikan alternatif yang perlu dikembangkan untuk membagi arah tanggung jawab perusahaan terhadap persoalan isu sosial dan lingkungan. (Mahdi, 2015) CSR dapat dijadikan strategi keberpihakan perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan, serta wujud kegiatan untuk menjaga dan melakukan upaya-upaya terhadap kemungkinan munculnya akses negatif industrialisasi, namun hakikatnya perusahaan yang memanfaatkan alam sebagai bahan baku perusahaan pasti membawa dampak negatif, meskipun memiliki manfaat untuk kesejahteraan dan pembangunan.

Untuk itu di dalam CSR adanya konsep *Triple Bottom Line* yang dikembangkan oleh John Elkington yang memandang jika suatu perusahaan ingin mempertahankan keberlangsungan perusahaannya, maka perlu menerapkan 3P yaitu pondasi seimbang terhadap aspek *profit* (keuntungan), *people* (masyarakat), dan *planet* (lingkungan), sehingga dikenal sebagai *Triple Bottom Line* (Elkington, 1997).

Oleh karena itu, salah satu konsep tersebut menegaskan kepada perusahaan agar dapat mempertahankan keberlangsungan hidupnya, perusahaan perlu menjalankan tanggung jawabnya sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program CSR ini diharapkan dapat memberikan

perhatian terhadap 3P yaitu *people*, *profit*, dan *planet*. Hal tersebut mengindikasikan bahwa selain mencari keuntungan (*profit*), perusahaan juga diharapkan peduli dan terlibat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (*people*) serta memberikan kontribusi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan atau sumber daya alam (*planet*).

Triple Bottom Line merupakan sebuah konsep yang dapat mencakup tiga dimensi penting yaitu keberlanjutan ekonomi, sosial dan lingkungan. Sehingga dalam pelaksanaan CSR tidak lepas dari aktor-aktor yang terlibat, mulai dari pihak perusahaan, pemerintah, swasta, dan masyarakat sekitar perusahaan. (Alqomadona, 2017). Faktanya lingkungan menjadi aspek yang mengalami kerusakan dan pencemaran, biasanya perusahaan tidak begitu memperhatikan dengan kondisi ini, padahal CSR lingkungan (sumber daya alam) dapat dijadikan sebagai investasi jangka panjang yang dapat menguntungkan perusahaan.

Dalam sebuah perusahaan, pengelolaannya dilakukan oleh manusia yang bertanggung jawab atas berbagai keputusan dan strategi operasionalnya. Seiring berjalannya waktu, aktivitas perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung dapat menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Hal ini berdampak tidak hanya pada manusia tetapi juga pada makhluk hidup lainnya. Menurut Arne Naess (Keraf, 2002) menyatakan bahwa permasalahan dan kerusakan lingkungan, atau dalam istilah luasnya adalah krisis lingkungan bersumber dari kesalahan fundamental dan radikal manusia terkait dengan cara pandang, pemahaman dan perilaku manusia terhadap dirinya, alam, dan penempatan manusia dalam keseluruhan ekosistem.

Salah satu kesalahan cara pandang tersebut bersumber dari paham etika antroposentrisme, dimana manusia secara sadar atau tidak sadar memaknai manusia sebagai pusat dari alam semesta dan mempunyai nilai, sehingga alam dan segala isinya sebagai alat pemuas kebutuhan dan kepentingan manusia semata (Keraf, 2002). Verdinano memaknai Undang-Undang pasal 33 ayat 3 yang berbunyi “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”, undang-undang tersebut merupakan salah satu contoh implementasi teori antroposentrisme, karena sumber daya alam yang dimiliki Indonesia diperuntukkan untuk kemakmuran masyarakat. Dampak dari hal tersebut adalah menurunnya kualitas lingkungan bagi seluruh makhluk hidup. Kepentingan manusia yang bersifat pendek dapat membentuk perilaku eksploitatif dan destruktif yang hanya mementingkan kepentingannya saja. (Siahaan, 2020)

Ketika membahas kepentingan manusia terhadap alam, maka politik lingkungan berada di dalamnya, karena terdapat sebuah gerakan kritik terhadap cara pandang dan perilaku manusia tanpa mempertimbangkan aspek kehidupan non-manusia. Disaat membahas terkait lingkungan, alam, beserta permasalahannya, maka hal tersebut selalu berkaitan dengan etika lingkungan khususnya antroposentrisme dan ekosentrisme. Jika terjadi kekeliruan terhadap cara pandang tersebut, maka akan menyebabkan perilaku keliru terhadap alam, dengan begitu manusia membutuhkan etika lingkungan untuk membenahan cara pandang dan perilaku manusia terhadap alam. Setiap permasalahan lingkungan mulai dirasakan dampaknya oleh masyarakat, seringkali muncul pertanyaan etika

yang harus dijawab sehingga kesadaran dan permasalahan lingkungan dapat menjadi permasalahan publik.

Mengingat manusia sebagai penyebab utama dalam permasalahan lingkungan, maka diperlukan penelitian mendalam untuk menggali alasan dibalik perilaku manusia yang semakin merusak alam. Sehingga, etika lingkungan dengan teori Sonny Keraf menjadi pisau analisis yang akan digunakan dalam meninjau permasalahan lingkungan yang terjadi.

Jika menelusuri penyebab dari permasalahan dan kerusakan lingkungan, maka akan menemukan berbagai faktor penyebab, akan tetapi yang menjadi salah satu penyebabnya adalah cara pandang, perilaku, dan pemahaman manusia yang menyebabkan adanya pencemaran dan perusakan lingkungan, terutama dalam kegiatan industri yang dilakukan oleh perusahaan, dimana perusahaan tersebut bersinggungan dengan alam sebagai bahan bakunya yang menyebabkan degradasi lingkungan. Salah satu perusahaan yang bersinggungan langsung dengan alam yaitu PT Indocement Tunggal Prakarsa.

PT Indocement Tunggal Prakarsa yang dikenal dengan Indocement merupakan salah satu produsen semen terkemuka di Indonesia yang berdiri dan beroperasi pada tahun 1975, Indocement merupakan perusahaan swasta yang dimiliki oleh *Heidelberg Cement Group* sebuah perusahaan yang berasal dari Jerman. Indocement memiliki 13 pabrik yaitu di Kalimantan dan Pulau Jawa, salah satu unit perusahaan PT Indocement Tunggal Prakarsa berada di Palimanan, tepatnya di Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. PT Indocement Tunggal prakarsa merupakan kategori perusahaan besar yang wajib melaksanakan

CSR sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, karena perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang berkaitan dengan alam sebagai bahan bakunya sekaligus perusahaan penghasil semen di Indonesia. Perusahaan semen dapat menimbulkan dampak yang tidak kecil, terutama terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat di sekitar pabrik, perusahaan semen merupakan sumber pencemaran yang berat, proses produksi berdampak buruk bagi lingkungan baik dari proses penyediaan bahan baku mutu sampai proses produksi. Bahan baku produksi merupakan batu kapur dimana pegunungan-pegunungan kapur akan terkikis dan semakin lama semakin habis yang dapat menyebabkan rusaknya ekosistem hutan kapur, perubahan aliran air dan hilangnya mata air, sehingga membawa dampak negatif bagi lingkungan dan kehidupan masyarakat disekitar perusahaan. Berikut tabel aktivitas pabrik dan dampak lingkungan dikutip dari (Sri Sulasmi, 2022) :

Tabel 1. 1 Aktivitas Pabrik dan Dampak Lingkungan

Aktivitas	Dampak	Permasalahan
Penambangan batu kapur	<ul style="list-style-type: none"> • Mata air dan aliran sungai hilang • Dentuman/Getaran 	<ul style="list-style-type: none"> • Kekeringan • Rumah retak
Proses Produksi	<ul style="list-style-type: none"> • Kebisingan • Debu • Bau 	<ul style="list-style-type: none"> • Gangguan Kesehatan
Pengangkutan (Jalan Raya)	<ul style="list-style-type: none"> • Kebisingan • Debu • Parkir di Jalan 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak nyaman • Tidak aman

Oleh sebab itu, CSR dapat dijadikan alternatif yang perlu dikembangkan untuk membagi arah tanggung jawab perusahaan terhadap persoalan isu sosial dan lingkungan.

Saat ini kegiatan program CSR PT Indocement di kabupaten Cirebon berbasis terhadap 5 (lima) pilar dan program pengembangan berkelanjutan (SDP). Pilar-pilar tersebut diantaranya adalah pilar pendidikan, pilar ekonomi, pilar kesehatan, pilar sosbudagor, pilar keamanan.

Beberapa prinsip yang dilakukan perusahaan diantaranya meminimalisir jejak lingkungan, menjadi tetangga yang baik, dan memastikan kepatuhan juga transparansi, inilah yang menjadi landasan bagi Indocement dan CSR untuk menjalankan program kerjanya. Komitmen dan dedikasi tanggung jawab sosial untuk mendukung keberlanjutan dalam visi dan misi perusahaan. Selain itu, pada tahun 2022 PT Indocement Tunggal Prakarsa di Cirebon mendapatkan empat penghargaan Jabar Juara Awards 2022 yaitu *1st Winner Corporate Environmental Responsibility Award*, *1st Winner Community Environmental Stewardship Award*, *2st Winner Poverty Alleviation Award* dan *3st Winner Sustainability Award*. Penghargaan ini dilihat dari aspek sosial, pendidikan, lingkungan, peningkatan daya beli, infrastruktur dan sanitasi lingkungan serta Covid-19.

Namun realita di lapangan dalam penelitian (Sutono, 2019), CSR yang menjadi tanggung jawab perusahaan tersebut masih memiliki beberapa permasalahan yaitu kurangnya keberlanjutan monitoring, evaluasi dan motivasi kepada masyarakat, masyarakat masih kesulitan dalam mendapatkan informasi terkait program-program CSR, kurangnya komunikasi dalam hal sosialisasi dan

transparansi kepada pemerintahan desa setempat, konflik kepentingan di masyarakat akibat distribusi penerimaan program CSR tidak merata dan aktivitas perusahaan yang masih berdampak terhadap lingkungan.

Hal tersebut memperlihatkan bahwa penjelasan diatas tidak menutup kemungkinan menandakan permasalahan sebenarnya bukan perihal materi dan teknis semata yang dilakukan perusahaan melalui CSR, akan tetapi pengelolaan cara pandang dan perilaku CSR yang perlu di perhatikan sehingga menimbulkan interaksi yang baik dengan *stakeholder* dan lingkungan. Dapat dikatakan bahwa pencemaran dan kerusakan lingkungan yang terjadi berkaitan dengan bagaimana etika yang mereka lakukan dalam pengelolaan CSR sebagai departemen yang menangani tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

Meski demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa perusahaan akan menimbulkan dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan sekitarnya. Sehingga CSR sebagai departemen yang bertanggung jawab langsung terhadap aspek sosial dan lingkungan dapat mengelola dan membagi arah kebijakan perusahaan dalam menangani berbagai persoalan tersebut. sehingga adanya dua kemungkinan etika lingkungan yang dilakukan perusahaan, pertama menerapkan etika lingkungan antroposentrisme sehingga dalam pengolahannya fokus untuk kepentingan dan keuntungan perusahaan saja, tetapi bisa saja menerapkan pengelolaan etika lingkungan ekosentrisme sehingga adanya keseimbangan antarara perusahaan, masyarakat dan lingkungan.

Pembahasan diatas dapat dikatakan menarik karena dalam pengelolaan CSR PT Indocement Tungal Prakarsa di Kabupaten Cirebon dilihat dari

kacamata politik lingkungan yang mencakup etika lingkungan antroposentrisme dan ekosentrisme. Dari sini etika lingkungan tersebut mencoba untuk menganalisis dan mencari tahu sehingga dapat mendeskripsikan bahwa karakteristik etika lingkungan dari PT Indocement Tunggal Prakarsa di Kabupaten Cirebon.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sutono (2019), yang berjudul “Implementasi Corporate Responsibility Indocement (Studi Kasus Pada Desa Palimanan Barat).” Penelitian ini menggunakan teori dan konsep dari sudut pandang ontology, epistemology, dan aksiologi. Penelitian ini memuat tentang Implementasi corporate sosial responsibility PT Indocement di Desa Palimanan barat yang sudah melaksanakan tanggung jawab sosial dengan berkomitmen menjalankan 5 pilar program pembangunan berkelanjutan. Tetapi dalam implementasi CSR PT Indocement di Desa Palimanan Barat masih ada beberapa kendala yang dihadapi. Seperti kurangnya berkelanjutan monitoring, evaluasi dan motivasi kepada mitra binaan. Dan kurangnya transparansi dan sosialisasi dengan pemerintah Desa Palimanan Barat. (Sutono, 2019)

Penelitian yang dilakukan oleh Ari Dhika Hidayatullah (2023) yang berjudul “Etika Lingkungan Ekosentrisme Terhadap Sistem Pengelolaan Sampah Di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Troketon Pedan.” Penelitian ini memuat sistem pengelolaan dan dampak sampah di TPA Troketon, melihat apakah sesuai dengan etika lingkungan ekosentrisme atau belum dalam pengelolaannya, serta dalam pengelolaannya TPA Troketon melihat alam secara holistik yang berdampak positif bagi lingkungan dengan meliputi biotik dan abiotik pada

penerapan IPST, IPL, dan *landfill*. Akan tetapi, terdapat beberapa sistem pengelolaan sampah yang belum mencerminkan etika ekosentrisme yang berdampak negatif bagi lingkungan (Hidayatullah, 2023).

Terakhir, Penelitian yang dilakukan oleh Erie Alqomadona (2017) yang berjudul “Perbandingan Praktik Corporate Social Responsibility Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara X Pabrik Gula Gempol Kerep dengan Perseroan Terbatas Coca Cola Amatil Indonesia di Kabupaten Mojokerto Tahun 2014-2016.” Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori politik CSR dilihat dari dua indikator yaitu redistribusi kebijakan dan koalisi kepentingan. Penelitian ini berfokus terhadap perbandingan praktik CSR kedua perusahaan. Penelitian ini membahas: Pertama, perbandingan yang dilihat dari persamaan dan perbedaan praktik CSR PTPN dengan PG Gempolkerep dengan PT Coca-Cola Amatil Indonesia. PTPN X PG Gempolkerep dilihat dari program perbaikan Patusan Drainase Paint Cane dan PT Coca-Cola Amatil Indonesia dilihat dari program Pembangunan 900 Sumur Serapan. Kedua, efektifitas perusahaan dalam menjalankan kegiatan CSR. Selain itu tidak terlepas dari dampak kerusakan lingkungan sehingga pemerintah setempat mewajibkan CSR kepada kedua perusahaan tersebut dengan melakukan kerjasama antara swasta, pemerintah dan masyarakat (Alqomadona, 2017).

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengelolaan Corporate Social Responsibility (CSR) yang dilaksanakan PT Indocement Tunggal Prakarsa di Kabupaten Cirebon ditinjau dari perspektif politik lingkungan?

2. Bagaimana karakteristik pengelolaan CSR PT Indocement Tungal Prakarsa di Kabupaten Cirebon ditinjau dari perspektif politik lingkungan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan kondisi lingkungan serta dampak dari pengelolaan CSR yang dilaksanakan PT Indocement Tungal Prakarsa di Kabupaten Cirebon.
2. Menjelaskan karakteristik CSR PT Indocement Tungal Prakarsa di Kabupaten Cirebon ditinjau dari perspektif politik lingkungan.

1.4 Batasan Penelitian

Penelitian ini membatasi ruang lingkup untuk menjaga fokus dan kedalaman analisis yaitu fokus pada pengelolaan CSR PT Indocement Tungal Prakarsa di Kabupaten Cirebon terhadap perspektif politik lingkungan dengan membawa teori utama yaitu etika antroposentrisme dan etika ekosentrisme. Penelitian ini hanya mengkaji interaksi tiga aktor yaitu CSR (perusahaan), Masyarakat, dan pemerintah Desa Cikeusal.

1.5 Manfaat Penelitian

A. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih ilmu dari hasil pemikiran mengenai permasalahan dan dapat memperkaya pengetahuan serta wawasan khususnya tentang corporate social responsibility dan politik lingkungan serta dapat memperkaya ilmu pengetahuan khususnya kajian ilmu politik. selain itu untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Siliwangi.

B. Manfaat Praktis

1. Bagi penulis diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan serta pengalaman tentang fenomena dan permasalahan yang terjadi dilapangan.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi perusahaan, sehingga perusahaan dapat meningkatkan tanggung jawab sosial kepada masyarakat dengan memperhatikan lingkungan sekitar.
3. Bagi masyarakat, menjadi bahan pengetahuan dan evaluasi masyarakat bagaimana perusahaan PT Indocement Tungal Prakarsa di Kabupaten Cirebon terkait dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan.